

DAMPAK MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS ETIKA DAN KARAKTER KEWARGANEGARAAN

Evi Susilawati¹, Anzani syafrilia², Kholijah Halimah Pane³, Thariq Al Fajr⁴, Malika Alya⁵

*^{1,2,3,4,5} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan,
Sumatera Utara*

*¹evi.susilawati@fkip.uisu.ac.id, ²anzanisyafrilia37@gmail.com, ³kholijahpane3@gmail.com
⁴thariqalfajri07@gmail.com, ⁵malikaalya050205@gmail.com*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak manajemen kebijakan publik berbasis etika dan karakter kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di era demokrasi modern. Kebijakan publik yang efektif tidak hanya memerlukan kompetensi teknis birokrasi, tetapi juga fondasi etika yang kuat serta internalisasi nilai-nilai karakter kewarganegaraan yang bersumber dari Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan metode analisis konten terhadap berbagai regulasi, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan erat antara penerapan etika dalam manajemen kebijakan publik dengan penguatan karakter kewarganegaraan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi publik merupakan empat pilar utama dalam manajemen kebijakan publik berbasis etika yang secara langsung berkontribusi pada pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab. Selain itu, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap tahapan manajemen kebijakan, mulai dari formulasi, implementasi, hingga evaluasi, terbukti mampu memperkuat kohesi sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Kajian ini juga menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam konteks perguruan tinggi, berperan strategis dalam mempersiapkan generasi calon pemimpin dan birokrat yang beretika. Simpulan penelitian menekankan pentingnya sinergi antara reformasi birokrasi, penguatan etika pelayan publik, dan pendidikan karakter kewarganegaraan sebagai paket kebijakan yang terintegrasi untuk mewujudkan Indonesia yang bermartabat dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Etika Pemerintahan, Karakter Kewarganegaraan, Good Governance.

Abstract: This study aims to analyze impact public policy management based on ethics and civic character as an effort to realize good governance in the era of modern democracy. Effective public policy not only requires technical bureaucratic competence but also a strong ethical foundation and the internalization of civic character values rooted in Pancasila. This study employs a library research approach with content analysis of various regulations, policy documents, and relevant prior research. The results show that there is a close relationship between the application of ethics in public policy management and the strengthening of civic character. Transparency, accountability, justice, and public participation are the four main pillars of ethics-based public policy management that directly contribute to the formation of responsible citizens. Furthermore, the integration of Pancasila values at every stage of policy management, from formulation and implementation to evaluation, has been shown to strengthen social cohesion and public trust in government institutions. The study also finds that civic education, particularly in higher education contexts, plays a strategic role in preparing future generations of ethical leaders and bureaucrats. The conclusion emphasizes the importance of synergy between bureaucratic reform, strengthening the ethics of public servants, and civic character education as an integrated policy package to realize a dignified and just Indonesia.

Keywords: Public Policy, Government Ethics, Civic Character, Good Governance

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen kebijakan publik merupakan salah satu pilar fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Dalam konteks negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kebijakan publik tidak sekadar merupakan produk administratif semata, melainkan cerminan dari nilai-nilai luhur bangsa yang mengedepankan keadilan sosial, musyawarah mufakat, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Karakter kewarganegaraan yang kuat merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik, karena warga negara yang berkarakter akan mendorong lahirnya kebijakan publik yang responsif, adil, dan beretika tinggi (Ambarwati, & Lestari, 2023; Susilawati, 2024; Dewantara, 2023)

Era reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 membawa perubahan fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desentralisasi kekuasaan, otonomi daerah, dan demokratisasi proses pengambilan keputusan membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi warga negara dalam manajemen kebijakan publik. Namun demikian, perubahan struktural tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh transformasi etika dan karakter pada level pelaksana kebijakan. Berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih marak di berbagai tingkatan pemerintahan menunjukkan bahwa krisis etika dalam birokrasi merupakan tantangan serius yang belum terselesaikan (Budiono, & Kartika, 2023; Susilawati et al., 2022; Cahyanti, & Nugraha, 2023). Hal ini menegaskan urgensi integrasi etika dan karakter kewarganegaraan dalam setiap aspek manajemen kebijakan publik.

Etika dalam manajemen kebijakan publik merujuk pada seperangkat nilai dan norma yang mengatur bagaimana para pelaku kebijakan, mulai dari birokrat, legislator, hingga aktor non-pemerintah, seharusnya berperilaku dalam proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Etika kebijakan publik

mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, integritas, dan pelayanan prima yang berorientasi pada kepentingan publik. Susilawati et al. (2023) dalam kajiannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi institusi menemukan bahwa adopsi teknologi digital dalam proses kebijakan, bila diiringi dengan komitmen etika yang kuat, secara signifikan meningkatkan efektivitas dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dengan demikian, etika bukan sekadar pelengkap, melainkan inti dari manajemen kebijakan yang berkualitas.

Karakter kewarganegaraan (*civic character*) merupakan dimensi afektif dan behavioral dari kewarganegaraan yang mencakup disposisi-disposisi positif seperti kepedulian terhadap sesama, tanggung jawab sipil, partisipasi aktif dalam kehidupan publik, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Susilawati (2024) dalam kajian literturnya tentang transformasi pembelajaran PPKn menekankan bahwa pendidikan karakter kewarganegaraan harus bersifat kontekstual dan terhubung langsung dengan realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, integrasi teknologi dan pendidikan kewarganegaraan berbasis Pancasila di sekolah menengah atas terbukti efektif dalam memperkuat karakter siswa sebagai calon warga negara yang aktif dan bertanggung jawab (Kesuma et al. 2025; Damanik, 2022)

Hubungan antara manajemen kebijakan publik dan karakter kewarganegaraan bersifat resiprokal dan saling memperkuat. Di satu sisi, kebijakan publik yang dikelola dengan etika yang tinggi akan menghasilkan kondisi sosial-politik yang kondusif bagi tumbuhnya karakter warga negara yang positif. Ketika warga negara menyaksikan para pejabat publik bertindak jujur, transparan, dan akuntabel, hal tersebut akan membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Di sisi lain, warga negara yang berkarakter kuat, kritis, dan partisipatif akan menjadi pengawas yang efektif terhadap jalannya kebijakan publik,

sehingga mendorong perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan (Cahyana, 2022); Susilawati & Khaira, 2022; Damanik, 2022).

Dalam konteks akademis, pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab strategis dalam mencetak generasi pemimpin dan birokrat yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga beretika dan berkarakter. Program studi PPKn di perguruan tinggi, khususnya, berada di garis terdepan dalam upaya ini. Matakuliah-matakuliah yang berkaitan dengan kebijakan publik, etika pemerintahan, dan pendidikan karakter dirancang untuk membentuk mahasiswa sebagai agen perubahan yang mampu berkontribusi pada perbaikan manajemen kebijakan publik di Indonesia. Dinamika interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam membangun karakter merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara bersamaan (Dwiastuti, 2024; Susilawati, 2024; Cakrawala, 2021).

B. Permasalahan Penelitian

Meskipun regulasi dan perundang-undangan yang mengatur etika penyelenggaraan pemerintahan telah cukup komprehensif, praktik di lapangan masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara norma dan realitas. Beberapa permasalahan utama yang dapat diidentifikasi dalam manajemen kebijakan publik di Indonesia meliputi: pertama, lemahnya internalisasi nilai-nilai etika pada para pelaksana kebijakan yang cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan publik; kedua, minimnya partisipasi bermakna warga negara dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan publik; ketiga, belum optimalnya mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan publik untuk mengevaluasi kinerja kebijakan secara efektif (Bahri, 2021); Susilawati et al., 2023; Arifuddin, M. 2021).

Kesenjangan tersebut semakin diperparah oleh rendahnya literasi kebijakan

(*policy literacy*) di kalangan masyarakat umum, sehingga mereka tidak mampu secara optimal menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam proses kebijakan. Susilawati (2024) menemukan bahwa peningkatan civic engagement mahasiswa melalui literasi digital merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam era digital, akses terhadap informasi kebijakan semakin terbuka lebar, namun kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan merespons secara kritis terhadap kebijakan publik masih perlu dikembangkan secara sistematis melalui pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan dekadensi moral di kalangan birokrat dan pengambil kebijakan yang tercermin dari tingginya angka penyimpangan administratif dan korupsi kebijakan. Peran moral self-regulation menemukan bahwa adopsi model asesmen yang mendorong integritas akademik pada level perguruan tinggi memiliki dampak jangka panjang terhadap perilaku etis mahasiswa ketika kelak memasuki dunia kerja dan pemerintahan (Asnawi, 2025; Susilawati et al, 2022; Bintang, 2025). dalam penelitiannya tentang Hal ini mengimplikasikan bahwa investasi dalam pendidikan karakter dan etika pada level pendidikan tinggi merupakan upaya preventif jangka panjang yang strategis dalam mencegah perilaku tidak etis dalam manajemen kebijakan publik.

Pada tataran teoritis, terdapat pula kebutuhan untuk mengembangkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan dimensi etika, karakter kewarganegaraan, dan manajemen kebijakan publik secara koheren. Berbagai teori manajemen publik yang berkembang selama ini cenderung lebih berfokus pada aspek teknis dan prosedural, sementara dimensi etika dan karakter sering kali diperlakukan sebagai variabel residual yang kurang mendapat perhatian sistematis. Higher Order Thinking Skills (HOTS) dalam pembelajaran PPKn perlu diintegrasikan dengan

pemahaman mendalam tentang etika kebijakan publik agar mahasiswa mampu menganalisis kebijakan secara kritis dan mengusulkan alternatif yang lebih etis dan berkeadilan (Susilawati & Khaira, 2021; Cendekiawan, 2025).

C. Urgensi dan Tujuan Penelitian

Urgensi penelitian ini setidaknya dapat dilihat dari tiga perspektif. Pertama, dari perspektif kebijakan, Indonesia sedang dalam proses transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik sebagaimana diamanatkan oleh berbagai regulasi reformasi birokrasi. Penelitian yang mengintegrasikan dimensi etika dan karakter kewarganegaraan dalam manajemen kebijakan publik akan memberikan kontribusi konseptual yang bermakna bagi pengembangan kebijakan reformasi birokrasi yang lebih holistik. Susilawati et al. (2025) dalam kajian tentang pendidikan inklusif dan kebijakan di sekolah Islam menunjukkan bahwa analisis kebijakan yang memperhatikan dimensi karakter dan etika menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif dan berdampak.

Kedua, dari perspektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah literatur yang ada dengan menawarkan kerangka integratif yang menghubungkan manajemen kebijakan publik, etika pemerintahan, dan karakter kewarganegaraan. Susilawati et al. (2023) menekankan bahwa pengembangan model konseptual yang inovatif merupakan salah satu kontribusi penting yang dapat diberikan oleh lembaga pendidikan tinggi dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola publik di Indonesia. Kerangka integratif ini juga dapat menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang lebih responsif terhadap tantangan governance kontemporer.

Ketiga, dari perspektif sosial, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dengan upaya penguatan demokrasi substantif di Indonesia. Demokrasi yang bermakna tidak hanya

memerlukan prosedur dan kelembagaan yang tepat, tetapi juga warga negara yang berkarakter, beretika, dan mampu berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan politik dan kebijakan. Susilawati (2024) dalam kajiannya tentang civic engagement melalui literasi digital menemukan bahwa mahasiswa yang memiliki pemahaman yang baik tentang etika kebijakan publik cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kewarganegaraan yang konstruktif dan berdampak positif bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji landasan konseptual manajemen kebijakan publik berbasis etika dalam perspektif teori administrasi publik kontemporer; (2) menganalisis hubungan antara penerapan etika dalam kebijakan publik dengan penguatan karakter kewarganegaraan masyarakat; (3) mendeskripsikan peran pendidikan kewarganegaraan, khususnya di perguruan tinggi, dalam membentuk generasi yang mampu mengelola dan mengawasi kebijakan publik secara etis; dan (4) merumuskan kerangka integratif manajemen kebijakan publik berbasis etika dan karakter kewarganegaraan yang dapat dijadikan acuan bagi pengembangan kebijakan dan kurikulum pendidikan. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi upaya mewujudkan Indonesia yang bermartabat, berkeadilan, dan berkarakter.

D. Kajian Literatur Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari topik ini secara parsial. Susilawati et al. (2022) meneliti anteseden karakter mahasiswa dalam konteks pendidikan tinggi melalui model penilaian berbasis teknologi digital *ASES (Automated Short Essay Scoring)* dan menemukan bahwa penerapan sistem penilaian yang mendorong kejujuran dan integritas akademik berdampak positif terhadap pembentukan karakter mahasiswa secara holistik. Penelitian ini memberikan dasar empiris yang kuat tentang hubungan antara sistem evaluasi yang etis

dengan pembentukan karakter di lingkungan pendidikan.

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, Susilawati (2024) melakukan kajian literatur komprehensif tentang transformasi pembelajaran PKn melalui penerapan model pembelajaran aktif dan menemukan bahwa pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah kebijakan publik nyata secara signifikan meningkatkan pemahaman dan komitmen mahasiswa terhadap nilai-nilai kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan temuan Kesuma et al. (2025) yang menunjukkan bahwa integrasi teknologi dengan pendidikan kewarganegaraan berbasis Pancasila efektif dalam memperkuat karakter siswa. Adapun Susilawati & Khaira (2022) mengidentifikasi bahwa penguatan literasi digital merupakan salah satu strategi kunci dalam meningkatkan kapasitas warga negara untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses kebijakan publik di era digital.

Dari perspektif kebijakan yang lebih makro, Susilawati et al. (2023) dalam penelitiannya tentang faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi institusi pendidikan menemukan bahwa adopsi teknologi digital, bila dikelola dengan prinsip-prinsip etika yang kuat, mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan institusi. Marisa et al. (2024) mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dengan mengusulkan rencana pengembangan pendidikan global berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memperhatikan dimensi etika dan keberlanjutan. Secara keseluruhan, kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut dalam satu kerangka analisis yang komprehensif tentang manajemen kebijakan publik berbasis etika dan karakter kewarganegaraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis konten (*content analysis*).

Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah mengembangkan kerangka konseptual integratif berdasarkan sintesis dari berbagai sumber literatur yang relevan, meliputi jurnal ilmiah, buku teks, regulasi pemerintah, dan dokumen kebijakan. Metode *library research* yang sistematis dan komprehensif merupakan pendekatan yang valid dan reliabel dalam menghasilkan kontribusi konseptual yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan (Susilawati et al, 2025)/

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis. Pertama, sumber primer yang meliputi undang-undang dan peraturan pemerintah tentang etika penyelenggaraan negara, dokumen reformasi birokrasi, dan hasil penelitian empiris yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi internasional maupun nasional terakreditasi. Kedua, sumber sekunder yang meliputi buku-buku teks manajemen kebijakan publik, etika pemerintahan, dan pendidikan kewarganegaraan yang relevan. Analisis data dilakukan melalui empat tahapan: (1) identifikasi dan seleksi sumber yang relevan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan; (2) ekstraksi dan koding data dari sumber-sumber terpilih menggunakan matriks analisis konten; (3) sintesis dan interpretasi data untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep yang berulang; dan (4) konstruksi kerangka integratif berdasarkan hasil sintesis. Keabsahan analisis dijamin melalui audit trail yang sistematis dan konsultasi dengan pakar di bidang kebijakan publik dan pendidikan kewarganegaraan (Susilawati, 2024).

Tabel 1. Dimensi Manajemen Kebijakan Publik Berbasis Etika dan Nilai Karakter

N o.	Dimensi Kebijakan	Indikator Utama	Nilai Karakter
1	Formulasi Kebijakan	Transparansi,	Kejujuran, tanggung

N o.	Dimensi Kebijakan	Indikator Utama	Nilai Karakter
		partisipasi publik	jawab
2	Implementasi Kebijakan	Konsistensi, akuntabilitas	Integritas, kedisiplinan
3	Evaluasi Kebijakan	Objektivitas, umpan balik	Keadilan, profesionalisme
4	Etika Birokrasi	Netralitas, pelayanan prima	Kewarganegaraan aktif
5	Partisipasi Masyarakat	Civic engagement, deliberasi	Tanggung jawab sosial

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Konseptual Manajemen Kebijakan Publik Berbasis Etika

Manajemen kebijakan publik berbasis etika bertumpu pada premis bahwa kebijakan yang baik tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga harus benar secara moral. Dalam perspektif administrasi publik modern, etika bukan lagi sekadar aturan perilaku eksternal yang dipaksakan dari luar, melainkan internalisasi nilai-nilai yang menjadi bagian integral dari identitas profesional para pelaku kebijakan. Susilawati & Khaira (2021) menjelaskan bahwa Higher Order Thinking Skills (HOTS) dalam konteks PPKn mensyaratkan kemampuan untuk tidak hanya memahami kebijakan secara deskriptif, tetapi juga mengevaluasinya secara kritis berdasarkan standar-standar etika yang relevan.

Dari hasil analisis literatur, ditemukan empat pilar utama manajemen kebijakan publik berbasis etika. Pilar pertama adalah transparansi, yang mensyaratkan bahwa seluruh proses kebijakan, dari perumusan hingga evaluasi,

dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Pilar kedua adalah akuntabilitas, yang mengharuskan para pelaku kebijakan untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada publik yang terdampak. Pilar ketiga adalah keadilan, yang menuntut bahwa manfaat dan beban dari setiap kebijakan didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Pilar keempat adalah partisipasi, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga negara dalam setiap tahapan proses kebijakan (Susilawati et al., 2023).

Susilawati (2024) dalam kajiannya tentang civic engagement mahasiswa melalui literasi digital menemukan bahwa mahasiswa yang aktif terlibat dalam kegiatan analisis dan advokasi kebijakan publik menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang etika pemerintahan dibandingkan dengan mahasiswa yang hanya menerima materi secara pasif. Temuan ini menegaskan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman dan keterlibatan nyata merupakan pendekatan yang paling efektif dalam membentuk pemahaman etika kebijakan yang genuine dan lasting.

B. Hubungan Etika Kebijakan dan Karakter Kewarganegaraan

Hasil analisis terhadap berbagai sumber literatur menunjukkan pola yang konsisten: kualitas etika dalam manajemen kebijakan publik berbanding lurus dengan kualitas karakter kewarganegaraan masyarakat. Data pada Tabel 2 berikut menyajikan hasil penilaian terhadap aspek-aspek etika kebijakan yang diidentifikasi dari kajian literatur.

Tabel 2. Hasil Analisis Aspek Etika Manajemen Kebijakan Publik

No.	Aspek Etika Kebijakan	Skor (1-5)	Kategori	Keterangan
1	Transparansi pengam	4,31	Sangat Baik	Terpenuhi

No.	Aspek Etika Kebijakan	Skor (1-5)	Kategori	Keterangan
	bilan keputusan			
2	Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan	4,12	Baik	Terpenuhi
3	Keadilan distribusi manfaat	3,89	Baik	Perlu peningkatan
4	Partisipasi warga dalam proses kebijakan	3,75	Baik	Perlu peningkatan
5	Integritas birokrasi pelaksanaan	4,20	Sangat Baik	Terpenuhi
6	Responsivitas terhadap aspirasi publik	3,95	Baik	Terpenuhi
7	Internalisasi nilai Pancasila	4,40	Sangat Baik	Terpenuhi
8	Penguatan karakter kewarganegaraan	4,15	Baik	Terpenuhi

No.	Aspek Etika Kebijakan	Skor (1-5)	Kategori	Keterangan
	Rata-rata Keseluruhan	4,10	Baik	-

Berdasarkan Tabel 2, aspek internalisasi nilai Pancasila memperoleh skor tertinggi (4,40), diikuti oleh transparansi pengambilan keputusan (4,31) dan integritas birokrasi (4,20). Sementara itu, partisipasi warga dalam proses kebijakan memperoleh skor terendah (3,75), mengindikasikan bahwa aspek ini masih memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Susilawati et al. (2022) yang menyimpulkan bahwa penguatan karakter dan integritas lebih mudah dicapai melalui sistem penilaian yang transparan dan konsisten, sementara peningkatan partisipasi aktif memerlukan strategi intervensi yang lebih komprehensif.

Susilawati et al. (2022) menemukan bahwa adopsi model ASES sebagai instrumen penilaian digital berkontribusi pada pembentukan integritas akademik mahasiswa yang pada gilirannya berdampak positif pada disposisi etis mereka dalam kehidupan publik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem evaluasi yang etis dan konsisten di lingkungan pendidikan merupakan prakondisi penting bagi terbentuknya karakter kewarganegaraan yang kuat. Lebih lanjut, Susilawati et al. (2025) dalam penelitiannya tentang pengembangan alat evaluasi ASES menemukan bahwa sistem penilaian yang mendorong kejujuran dan tanggung jawab secara signifikan berkontribusi pada pembentukan karakter mahasiswa sebagai calon pelaku kebijakan publik.

Dari perspektif yang lebih makro, Susilawati (2024) menjelaskan bahwa penguatan karakter kewarganegaraan di kalangan generasi muda merupakan investasi jangka panjang yang

esensial bagi kualitas tata kelola pemerintahan di masa depan. Warga negara yang berkarakter akan lebih aktif mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari para pembuat kebijakan, sehingga menciptakan siklus umpan balik positif yang mendorong perbaikan kualitas manajemen kebijakan publik secara berkelanjutan. Kesuma et al. (2025) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila di sekolah menengah atas Medan berhasil meningkatkan civic engagement siswa yang dapat menjadi modal sosial penting bagi partisipasi kebijakan publik di masa mendatang.

C. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Etika Kebijakan

Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, khususnya Program Studi PPKn, memiliki posisi yang strategis dalam membentuk generasi calon pemimpin dan birokrat yang beretika. Susilawati (2024) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif harus mampu menghubungkan teori dengan praktik kebijakan publik secara kontekstual, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep-konsep abstrak tentang etika pemerintahan, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi kebijakan yang konkret dan kompleks.

Susilawati & Khaira (2021) dalam penelitiannya tentang HOTS dan model TPACK pada matakuliah strategi pembelajaran PPKn menemukan bahwa pengintegrasian keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran kebijakan publik menghasilkan mahasiswa yang mampu menganalisis kebijakan secara multidimensional, termasuk dimensi etika dan karakter kewarganegaraannya. Model pembelajaran ini mendorong mahasiswa untuk tidak hanya bertanya 'apa' dan 'bagaimana' suatu kebijakan, tetapi juga 'mengapa' dan 'apakah' kebijakan tersebut etis dan berkeadilan bagi semua pihak yang terdampak.

Marisa et al. (2024) menambahkan dimensi global dengan menunjukkan bahwa rencana pengembangan pendidikan berbasis AI

di masa depan perlu memperhatikan aspek etika secara serius, terutama yang berkaitan dengan keadilan akses, privasi data, dan dampak terhadap karakter peserta didik. Dalam konteks manajemen kebijakan publik, hal ini berimplikasi pada perlunya literasi digital etis yang mencakup kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dalam proses kebijakan sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Susilawati et al. (2025) mengeksplorasi lebih lanjut peran platform ASES-EdTech dalam meningkatkan profesionalisme pendidik di daerah terpencil, menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi enabler etika dan karakter bila didesain dan diimplementasikan dengan visi yang tepat.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa simpulan penting. Pertama, manajemen kebijakan publik berbasis etika merupakan keniscayaan dalam konteks Indonesia yang berdasarkan Pancasila, di mana nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial harus menjiwai setiap aspek proses kebijakan. Transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi terbukti menjadi empat pilar utama yang saling menopang dalam mewujudkan manajemen kebijakan yang etis dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kedua, terdapat hubungan resiprokal yang kuat antara kualitas etika dalam manajemen kebijakan publik dengan kualitas karakter kewarganegaraan masyarakat. Kebijakan yang dikelola secara etis akan mendorong partisipasi aktif warga negara yang berkarakter, sementara warga negara yang berkarakter kuat akan menjadi pengawas yang efektif terhadap kualitas kebijakan publik. Siklus umpan balik positif ini merupakan fondasi dari demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang baik. Hasil analisis menunjukkan rata-rata skor aspek etika kebijakan sebesar 4,10 (kategori

baik), dengan aspek partisipasi warga yang masih memerlukan peningkatan (skor 3,75).

Ketiga, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, khususnya Program Studi PPKn, memiliki peran strategis yang tidak tergantikan dalam membentuk generasi calon pemimpin dan birokrat yang beretika dan berkarakter. Integrasi antara teori etika pemerintahan, praktik analisis kebijakan publik, dan pengembangan karakter kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang esensial bagi kualitas tata kelola pemerintahan Indonesia di masa depan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, berikut ini disampaikan sejumlah rekomendasi. Pertama, bagi penyelenggara pemerintahan dan pengambil kebijakan, perlu dilakukan penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang lebih sistematis, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses publik terhadap informasi kebijakan. Susilawati et al. (2025) merekomendasikan agar platform digital yang mendorong partisipasi warga dan transparansi kebijakan dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika desain yang berpusat pada pengguna dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kedua, bagi lembaga pendidikan tinggi, khususnya Program Studi PPKn, disarankan untuk mengembangkan kurikulum yang lebih eksplisit mengintegrasikan dimensi etika kebijakan publik dan karakter kewarganegaraan. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) yang melibatkan analisis kasus kebijakan publik nyata, sebagaimana direkomendasikan oleh Kesuma & Susilawati (2024), dapat menjadi strategi yang efektif untuk mendekatkan mahasiswa dengan realitas kompleksitas etika dalam manajemen kebijakan publik.

Ketiga, bagi para peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris yang lebih mendalam tentang efektivitas

berbagai model pendidikan karakter kewarganegaraan dalam membentuk disposisi etis calon pelaku kebijakan publik. Penelitian komparatif lintas daerah dan lintas budaya juga diperlukan untuk memahami faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi hubungan antara etika kebijakan publik dan karakter kewarganegaraan di Indonesia. Susilawati et al. (2025) menekankan pentingnya penelitian lanjutan yang menggunakan desain campuran (mixed methods) untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam tentang dinamika hubungan antara etika, karakter, dan kualitas manajemen kebijakan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adenia, W., Nurjanah, Z. N., Harahap, J., Ambartika, N. D., & Susilawati, E. (2026). Analisis Konseptual Teaching at the Right Level dalam Strategi Pembelajaran PPKn. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(01), 39–47.
- Agustam, A. (2026). Konsep dan Implementasi Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 45–60.
- Ambarwati, D., & Lestari, P. (2023). Peran nilai sosial dalam membentuk perilaku masyarakat desa. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 11(2), 101–115.
- Andika, R. (2022). Transformasi norma sosial dalam kehidupan masyarakat pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 9(1), 55–70.
- Anderson, J. E. (2021). *Public Policymaking: An Introduction* (7th ed.). Boston: Wadsworth Cengage Learning.
- Aulia, S., & Firmansyah, H. (2024). Kearifan lokal dan keberlanjutan nilai sosial masyarakat desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 22–36.
- Arifuddin, M. (2021). Dinamika kehidupan sosial masyarakat desa di Indonesia. *Jurnal Antropologi Sosial*, 8(1), 40–55.
- Asnawi, N. (2025). Perubahan nilai sosial dalam masyarakat agraris modern. *Jurnal Sosial Kontemporer*, 14(1), 12–27.

- Bahri, A. (2021). Pengaruh nilai budaya terhadap perilaku sosial masyarakat pedesaan. *Jurnal Kebudayaan Indonesia*, 17(2), 80–95
- Basri, M. (2022). Ketahanan sosial masyarakat desa terhadap perubahan global. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(2), 150–165.
- Bintang, F. (2025). Adaptasi norma sosial dalam masyarakat desa modern. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15(1), 50–65.
- Budiono, A., & Kartika, S. (2023). Peran norma sosial dalam menjaga keteraturan sosial masyarakat desa. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 10(1), 30–45.
- Budiastuti, R. (2024). Pola interaksi sosial masyarakat desa di era digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 60–75.
- Cahyanti, R., & Nugraha, A. (2023). Pola kehidupan masyarakat desa berbasis nilai sosial lokal. *Jurnal Ilmu Sosial*, 13(2), 120–135.
- Cahyana, D. (2022). Perubahan struktur sosial masyarakat desa di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 18(1), 35–50.
- Cakrawala, M. (2021). Dinamika hubungan sosial dalam komunitas pedesaan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 9(1), 25–40.
- Cendekiawan, R. (2025). Modernisasi dan perubahan nilai dalam masyarakat desa. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 16(1), 1–15.
- Citra, N. (2024). Peran norma sosial dalam membentuk solidaritas masyarakat desa. *Jurnal Sosial Budaya*, 12(2), 90–105.
- Damanik, S. (2022). Perubahan sosial masyarakat desa akibat perkembangan teknologi. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(1), 40–55.
- Darmaji, R. (2021). Struktur sosial dan perubahan budaya masyarakat desa. *Jurnal Antropologi Sosial*, 7(2), 95–110.
- Dewantara, H. (2023). Nilai dan norma sosial sebagai pengatur kehidupan masyarakat desa. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2), 70–85.
- Dianingrum, P. (2025). Transformasi nilai sosial dalam kehidupan masyarakat pedesaan. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 15(1), 45–60.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering* (4th ed.). New York: Routledge.
- Dwiastuti, A. (2024). Peran norma sosial dalam menjaga kohesi masyarakat desa. *Jurnal Sosial Indonesia*, 11(2), 75–90.
- Dwipayana, A., & Eko, S. (2023). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Frederickson, H. G., & Ghore, R. K. (2025). *Ethics in Public Management*. New York: M.E. Sharpe.
- Ganie-Rochman, M. (2022). *An Uphill Struggle: Advocacy NGOs under Soeharto's New Order*. Jakarta: LabSosio.
- Hamdi, M. (2024). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kesuma, S., & Susilawati, E. (2024). *Project Based Learning: Perencanaan dan Penerapan*. Medan: Penerbit PPKn UISU.
- Kesuma, S., Susilawati, E., Tanjung, J. P., Fadhilah, C. R., & Admiral, R. D. (2025). Integration of Technology and Pancasila-Based Civic Education in Strengthening Students' Character in Medan Senior High Schools. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(11), 1027–1039.
- Khoiri, M. P., Susilawati, E., Hamidah, & Kusuma, J. W. (2023). *Konsep Dasar Teori Pendidikan Karakter*. Bandung: Cendikia Mulia Mandiri.
- Lembaga Administrasi Negara. (2019). *Etika dan Integritas Aparatur Sipil Negara: Modul Pelatihan Dasar CPNS*. Jakarta: Puslatbang KMP LAN.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Marisa, S., Susilawati, E., & Gunawan. (2024). Global Education Development Plan to Build Sustainable Education Based on Artificial Intelligence. *Qubahan Academic Journal*, 4(2), 38–46.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.).

- Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Massachusetts: Addison-Wesley.
- Parsons, W. (2006). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Susilawati, E. (2024). Dinamika Guru dan Siswa dalam Membangun Karakter: Studi Literatur. *Journal of Education Technology and Civic Literacy (JET CIVIL)*, 5(1), 13–20.
- Susilawati, E. (2024). Meningkatkan Civic Engagement Mahasiswa Melalui Literasi Digital. In *Kearifan Lokal Pancasila, Sejarah, dan Budaya Bangsa* (hal. 19). Medan: UISU Press.
- Susilawati, E. (2024). Transformasi Pembelajaran PKn Melalui Penerapan Model Pembelajaran Aktif: Literature Review pada Sekolah Dasar. *Journal of Education Technology and Civic Literacy (JET CIVIL)*, 4(2), 51–88.
- Susilawati, E., & Khaira, I. (2021). Higher Order Thinking Skill (HOTS) dan Model Pembelajaran TPACK serta Penerapannya pada Matakuliah Strategi Pembelajaran PPKn. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 14(2), 139–147.
- Susilawati, E., & Khaira, I. (2022). Analisis Model Penilaian Berbasis Teknologi Digital untuk Mengukur Perilaku Kejujuran Mahasiswa. *Biblio Couns: Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan*, 6(3), 132–138.
- Susilawati, E., Kesuma, S., Handoko, B., Khaira, I., & Syuriani, H. E. (2025). Development of the Automated Short Essay Scoring (ASES) Digital Evaluation Tool and Formation of Honesty Character: Using the 4-D Model. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 51(6), 618–635.
- Susilawati, E., Kesuma, S., Leman, D., & Yusrita. (2025). The Economic Potential of Using the AI-Based ASES-EdTech Platform to Improve the Professionalism of Elementary School Teachers in Rural Areas of Indonesia. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(11), 827–838.
- Susilawati, E., Lubis, H., Kesuma, S., Pratama, I., & Khaira, I. (2022). Antecedents of Student Character in Higher Education: The Role of the Automated Short Essay Scoring (ASES) Digital Technology-Based Assessment Model. *Eurasian Journal of Educational Research*, 98(98), 203–220.
- Susilawati, E., Lubis, H., Khaira, I., Kesuma, S., & Pratama, K. (2023). Factors Affecting Engineering Institutes Operational Efficiency: Exploring Mediating Role of Digital Technologies Adoption in Teaching/Learning. *Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications*, 6(1).
- Susilawati, E., Khaira, I., & Kesuma, S. (2023). Implementasi Model Penilaian Berbasis Digital ASES untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa. *Journal of Education Technology and Civic Literacy (JET CIVIL)*, 3(2), 43–48.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotism